

Pengembangan Pelatihan Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah Menggunakan Model ADDIE Berbasis Online

Kondrad Sawang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: sawangkondradsawang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya skor Survei Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada dimensi sosialisasi anti korupsi yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan terstruktur. Penelitian ini bertujuan mengembangkan program pelatihan anti korupsi berbasis online menggunakan model ADDIE di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan pendekatan Research and Development melalui tahapan Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan angket uji ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum, silabus, dan website pelatihan anti korupsi mampu menghasilkan model pelatihan yang sistematis, fleksibel, dan layak digunakan untuk meningkatkan pemahaman anti korupsi, integritas, serta budaya pelayanan publik ASN. Simpulan penelitian ini adalah model ADDIE efektif digunakan dalam pengembangan pelatihan anti korupsi ASN berbasis digital di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Anti Korupsi, Aparatur Sipil Negara, Model ADDIE, Pelatihan Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan fundamental yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat pembangunan nasional (Hartanti, 2005; Chaerudin, 2008). Dalam konteks kebangsaan, korupsi merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena berhubungan langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas, dan rendahnya budaya akuntabilitas (Maheka, 2023). Fenomena korupsi di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari gratifikasi, suap, penggelapan jabatan, benturan kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan birokrasi (Rohim, 2008). Oleh sebab itu, korupsi tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum individual, tetapi sebagai masalah struktural yang membutuhkan pendekatan sistematis melalui penegakan hukum, penguatan budaya integritas, dan pendidikan anti korupsi berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan karakter bangsa, pemberantasan korupsi harus diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga preventif melalui pendidikan dan pelatihan (Wahyudi, 2024).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki posisi strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan bebas korupsi. ASN dituntut menjadi pelaksana kebijakan publik sekaligus teladan integritas dalam kehidupan bernegara (Abnur, 2017). Namun demikian, tantangan birokrasi modern menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk membangun integritas ASN. Diperlukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan (Winarry & Faihaah, 2016). Dalam kebijakan pengembangan sumber daya

manusia aparatur, pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN (Jalis, 2021). Pelatihan yang efektif harus didasarkan pada analisis kebutuhan organisasi, relevansi terhadap tantangan aktual, serta mampu menghasilkan perubahan perilaku nyata dalam organisasi (Marpaung & Mataram, 2006; Entang, 2009). Dengan demikian, ketika suatu wilayah menunjukkan kerentanan integritas birokrasi berdasarkan evaluasi nasional, maka intervensi pelatihan anti korupsi menjadi kebutuhan strategis.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berada pada kategori rentan, khususnya pada aspek sosialisasi anti korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman, kesadaran, dan budaya anti korupsi di kalangan ASN masih memerlukan perhatian serius. Rendahnya indeks sosialisasi anti korupsi menandakan bahwa internalisasi nilai integritas belum sepenuhnya menjadi budaya birokrasi (Wahyudi, 2025a). Dalam konteks tersebut, pengembangan pelatihan anti korupsi yang berbasis kebutuhan daerah menjadi sangat relevan sebagai strategi penguatan reformasi birokrasi. Pelatihan anti korupsi bagi ASN tidak cukup hanya disisipkan secara parsial dalam kurikulum pelatihan dasar, tetapi perlu dikembangkan sebagai program khusus yang fokus pada pemahaman konsep korupsi, delik tindak pidana korupsi, kesadaran anti korupsi, dan aktualisasi integritas (Tim Penyusun Modul KPK, 2015). Menurut Pribadi (2024), pengembangan program pelatihan yang efektif membutuhkan desain pembelajaran yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, desain program, pengembangan produk, implementasi, hingga evaluasi. Model tersebut dikenal luas melalui pendekatan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang dianggap mampu menghasilkan produk pelatihan yang lebih terarah, efisien, dan aplikatif (Reigeluth, 1983; Sugiyono, 2020).

Selain itu, transformasi digital dalam birokrasi modern juga menuntut inovasi sistem pembelajaran berbasis teknologi. Digitalisasi pelatihan memungkinkan ASN mengikuti proses pembelajaran secara fleksibel tanpa mengganggu tugas pelayanan publik, sehingga lebih efisien dari aspek waktu, biaya, dan aksesibilitas (Baseng, 2016; Fadly, 2022). Pengembangan website pelatihan anti korupsi berbasis online menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan ASN di era pemerintahan digital (Wahyudi, 2023). Sebagai bagian dari inovasi penguatan integritas ASN daerah, penelitian ini mengajukan Pengembangan Program Pelatihan Anti Korupsi ASN Provinsi Kalimantan Tengah Menggunakan Model ADDIE Berbasis Online. Program ini dirancang untuk menghasilkan kurikulum, silabus, dan website pembelajaran yang terintegrasi sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan daerah, rekomendasi KPK, dan tuntutan reformasi birokrasi berbasis integritas (Wahyudi, 2025c). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga solusi praktis bagi penguatan budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

State of the Art

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian anti korupsi di Indonesia mayoritas berfokus pada pendidikan anti korupsi di sekolah, perguruan tinggi, dan pembentukan karakter peserta didik (Tim Penyusun Modul, 2014). Pendekatan tersebut lebih menekankan internalisasi nilai moral dan civic values, namun belum banyak menyentuh pengembangan program pelatihan profesional anti korupsi bagi ASN secara khusus. Dalam sektor birokrasi, kajian lebih banyak menyoroti reformasi birokrasi, zona integritas, dan akuntabilitas ASN (Suprpti, 2019), tetapi belum terfokus pada pengembangan kurikulum anti korupsi ASN daerah berbasis digital. Penelitian tentang pengembangan pelatihan ASN umumnya masih

bersifat umum pada peningkatan kompetensi dasar, kepemimpinan, dan pelayanan publik (Jalis, 2021). Pribadi (2024) menekankan bahwa desain pelatihan berbasis kompetensi memerlukan integrasi antara kurikulum, strategi pembelajaran, media, dan evaluasi dalam satu kerangka sistematis. Namun implementasi khusus untuk anti korupsi ASN daerah masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, penelitian Wahyudi (2024c) juga menegaskan pentingnya penguatan civic integrity sebagai basis reformasi birokrasi lokal. Oleh karena itu, posisi kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga komponen utama secara simultan, yakni 1.) Pengembangan kurikulum pelatihan anti korupsi ASN; 2.) Pengembangan silabus pembelajaran anti korupsi ASN; dan 3.) Pengembangan website pembelajaran anti korupsi berbasis online.

Gap Analysis

Berdasarkan kajian pustaka, terdapat beberapa kesenjangan utama:

1. Gap Substansi. Penelitian terdahulu lebih dominan pada pendidikan anti korupsi formal dan penguatan moral umum, belum fokus pada ASN daerah sebagai sasaran strategis
2. Gap Regional. Belum tersedia model pelatihan anti korupsi berbasis kebutuhan lokal Kalimantan Tengah yang secara langsung merespons hasil SPI dan rekomendasi KPK
3. Gap Produk. Sebagian besar penelitian hanya menghasilkan modul atau rekomendasi kebijakan, belum menghasilkan kurikulum, silabus, dan platform digital secara terintegrasi
4. Gap Teknologi. Masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan anti korupsi ASN dengan sistem online learning berbasis website
5. Gap Metodologis. Penggunaan Model ADDIE secara penuh dalam pengembangan pelatihan anti korupsi ASN daerah masih jarang ditemukan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengembangkan kurikulum pelatihan anti korupsi ASN Provinsi Kalimantan Tengah. Mengembangkan silabus pelatihan anti korupsi ASN Provinsi Kalimantan Tengah. Mengembangkan website pelatihan anti korupsi berbasis online. Menguji kelayakan produk pelatihan melalui uji ahli

Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Penulis/Tahun | Judul | Tujuan | Metode | Hasil | Kontribusi dan Relevansi |
|----|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Tim Penyusun Modul KPK (2015) | Modul Anti Korupsi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan | Menanamkan nilai anti korupsi ASN dasar | Deskriptif | Modul anti korupsi ASN | Dasar materi anti korupsi |
| 2 | Jalis (2021) | Modul Kompeten Pelatihan Dasar CPNS | Mengembangkan kompetensi ASN | Pengembangan kurikulum | Integritas ASN dasar | Relevan namun parsial |
| 3 | Pribadi (2024) | Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi | Mengembangkan model pelatihan sistematis | R&D | Model ADDIE efektif | Landasan metodologis utama |
| 4 | Baseng (2016) | Inovasi Sistem Diklat | Modernisasi pelatihan ASN | Konseptual | Digitalisasi diklat | Dasar platform online |
| 5 | Sugiyono (2020) | Metode Penelitian dan Pengembangan | Validasi produk penelitian | R&D | Uji ahli sistematis | Dasar pengujian produk |

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan yang bertujuan menghasilkan produk pendidikan berupa kurikulum, silabus, dan website pelatihan anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berorientasi pada pengkajian fenomena, tetapi juga pada penciptaan produk yang dapat diterapkan secara

nyata dalam pengembangan kompetensi ASN. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa metode penelitian dan pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu sekaligus menguji efektivitasnya. Dalam konteks ini, produk yang dikembangkan dirancang sebagai model komprehensif pelatihan anti korupsi berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) karena model ini sistematis, terstruktur, dan banyak digunakan dalam pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi (Pribadi, 2024; Reigeluth, 1983; Reigeluth, 2009).

Pada tahap Analysis, penelitian diawali dengan analisis kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, kebutuhan kompetensi ASN, serta kesenjangan dalam sistem pendidikan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis kebutuhan dilakukan melalui studi literatur, studi kebijakan, observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Marpaung dan Mataram (2006) menegaskan bahwa analisis kebutuhan diklat merupakan fondasi utama dalam merancang program pelatihan yang efektif karena memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan tujuan pembelajaran. Penelitian ini juga mengacu pada pandangan Entang (2009) bahwa kebutuhan pelatihan harus dirumuskan berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi institusi. Oleh sebab itu, peneliti menelaah berbagai regulasi terkait anti korupsi, seperti kebijakan KPK, LAN, serta reformasi birokrasi ASN, agar produk yang dikembangkan relevan secara normatif dan kontekstual. Dalam perspektif Wahyudi (2025a), pengembangan kompetensi ASN berbasis integritas harus menyesuaikan karakteristik lokal daerah agar lebih aplikatif.

Tahap Design difokuskan pada perancangan kurikulum, silabus, dan struktur website pembelajaran. Penyusunan desain dilakukan dengan mengacu pada teori instructional design yang dikembangkan Reigeluth (1983; 1999; 2009), yang menekankan pentingnya sistem pembelajaran yang dirancang berdasarkan tujuan, karakter peserta, materi, dan strategi evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menyusun capaian pembelajaran, struktur materi, urutan topik, strategi pembelajaran, evaluasi, serta integrasi platform digital. Materi pelatihan dirancang mencakup pemahaman dasar korupsi, regulasi anti korupsi, budaya integritas, pencegahan korupsi, studi kasus, serta implementasi nilai anti korupsi dalam pelayanan publik (Maheka, 2023; Tim Penyusun Modul, 2014). Perancangan silabus dan sistem diklat juga mengacu pada prinsip perancangan sistem diklat dari Sri Ratna (2016) dan Baseng (2016), yang menekankan pentingnya inovasi digital dalam sistem pelatihan ASN modern.

Tahap Development merupakan proses pengembangan produk nyata berdasarkan desain yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan modul pelatihan, bahan ajar, struktur evaluasi, dan website pembelajaran berbasis online. Produk website dirancang sebagai media pembelajaran digital yang memungkinkan ASN mengakses materi secara fleksibel, mengikuti evaluasi, serta melakukan pembelajaran mandiri. Pengembangan media digital ini penting karena transformasi sistem pembelajaran ASN harus selaras dengan tuntutan digitalisasi birokrasi modern (Baseng, 2016). Selain itu, produk yang dihasilkan divalidasi oleh ahli materi, ahli kurikulum, dan ahli media untuk memastikan kesesuaian substansi, struktur pembelajaran, dan kualitas teknis. Tahap Implementation dilakukan melalui uji coba terbatas kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Implementasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keterpahaman, kemudahan penggunaan, relevansi materi, serta efektivitas website pelatihan. Menurut Pribadi (2024), implementasi produk pengembangan harus dilakukan secara terbatas sebelum digunakan secara luas agar peneliti memperoleh masukan untuk revisi. Uji coba ini juga menjadi langkah penting untuk melihat bagaimana produk dapat berfungsi dalam konteks nyata birokrasi daerah. Tahap Evaluation dilakukan

untuk menilai validitas, efektivitas, dan kelayakan produk. Evaluasi meliputi uji ahli, uji pengguna, revisi produk, serta penyempurnaan akhir. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa evaluasi dalam penelitian pengembangan bertujuan memastikan produk memenuhi standar akademik dan praktis. Penelitian ini menggunakan evaluasi formatif dan sumatif agar produk yang dihasilkan benar-benar layak diterapkan sebagai model pelatihan ASN.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis kebutuhan, studi kasus, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kepada widyaiswara, ASN, dan pemangku kebijakan untuk menggali kebutuhan, tantangan, dan persepsi mereka terkait pendidikan anti korupsi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi aktual sistem pelatihan ASN, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menganalisis kebijakan, modul, dan dokumen resmi terkait anti korupsi. Pendekatan kuantitatif digunakan pada tahap validasi produk melalui angket atau kuesioner dengan skala Likert. Angket diberikan kepada ahli dan pengguna untuk menilai aspek isi, desain, media, serta efektivitas pembelajaran. Santosa (2023) menjelaskan bahwa analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan produk berdasarkan skor rata-rata dan persentase. Dengan demikian, hasil kuantitatif dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar objektif untuk menentukan kualitas produk yang dikembangkan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN. Subjek penelitian meliputi widyaiswara, ASN, pakar anti korupsi, ahli kurikulum, dan ahli media pembelajaran. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kompetensi dan relevansi terhadap tujuan penelitian (Sugiyono, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Observasi dilakukan secara sistematis terhadap kondisi pelatihan ASN yang telah berjalan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali kebutuhan mendalam responden. Dokumentasi meliputi kajian terhadap peraturan, modul, dan kebijakan. Angket digunakan untuk uji validasi dan evaluasi produk. Teknik ini selaras dengan prinsip penelitian kediklatan yang dikemukakan Sugiyanto dan Purwanto (2006), bahwa penelitian pengembangan diklat harus memadukan data empiris dan evaluatif. Data kualitatif dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa skor rata-rata dan persentase. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan expert judgment agar hasil penelitian memiliki validitas tinggi (Pribadi, 2024). Penelitian juga memperhatikan etika penelitian berupa persetujuan responden, kerahasiaan data, dan objektivitas akademik. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan model pelatihan anti korupsi ASN berbasis digital yang tidak hanya teoritis, tetapi aplikatif dan relevan dengan kebutuhan birokrasi daerah. Produk akhir penelitian berupa kurikulum, silabus, dan website pelatihan diharapkan menjadi inovasi strategis dalam penguatan integritas ASN Kalimantan Tengah serta berkontribusi terhadap reformasi birokrasi nasional

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus pada pengembangan kurikulum, silabus, dan website pelatihan anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil penelitian diperoleh melalui analisis kebutuhan, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan uji ahli terhadap produk yang dikembangkan menggunakan model

ADDIE. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi awal pelatihan anti korupsi bagi ASN di lingkungan penelitian masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem digital, dan sebagian besar materi hanya disampaikan melalui pendekatan seminar, sosialisasi, atau pelatihan umum yang belum dirancang khusus sesuai kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, ditemukan bahwa sebagian besar ASN telah memahami korupsi sebagai tindakan melawan hukum, namun pemahaman terkait bentuk korupsi administratif, konflik kepentingan, gratifikasi, serta strategi pencegahan berbasis sistem masih berada pada kategori sedang. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya program pelatihan yang lebih terstruktur, kontekstual, dan dapat diakses secara fleksibel.

Tabel 1. Kondisi Awal Pemahaman ASN terhadap Pendidikan Anti Korupsi

| No | Predikat | Jumlah ASN | Total (%) |
|-----------|-------------|------------|-----------|
| 1 | Sangat Baik | 4 Orang | 20% |
| 2 | Baik | 6 Orang | 30% |
| 3 | Cukup | 7 Orang | 35% |
| 4 | Tidak Cukup | 3 Orang | 15% |
| Rata-rata | | | 64,8 |
| Predikat | | | Cukup |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ASN berada pada kategori “Cukup” dengan rata-rata skor 64,8. Kelompok terbesar terdapat pada kategori cukup sebesar 35%, sedangkan kategori sangat baik hanya mencapai 20%. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman dasar telah ada, tetapi masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan widyaiswara dan ASN, ditemukan tiga kebutuhan utama, yaitu: (1) materi anti korupsi yang lebih aplikatif sesuai konteks birokrasi daerah; (2) silabus pelatihan yang sistematis dan berjenjang; serta (3) platform pembelajaran online yang dapat diakses secara mandiri. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan produk penelitian. Pada tahap desain, peneliti berhasil mengembangkan struktur kurikulum yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu: dasar hukum anti korupsi, bentuk dan modus korupsi, pembangunan budaya integritas ASN, strategi pencegahan korupsi birokrasi, serta evaluasi pembelajaran. Kurikulum ini kemudian diterjemahkan ke dalam silabus yang memuat capaian pembelajaran, indikator, materi pokok, metode, media, dan evaluasi. Produk website pelatihan yang dikembangkan memuat menu utama berupa dashboard pembelajaran, modul digital, video materi, forum diskusi, asesmen, dan sertifikat pelatihan. Hasil uji ahli materi menunjukkan bahwa substansi pelatihan telah sesuai dengan prinsip pendidikan anti korupsi nasional dan kebutuhan ASN daerah. Hasil uji ahli kurikulum menunjukkan bahwa struktur pembelajaran sistematis dan relevan. Hasil uji ahli media menunjukkan website mudah diakses, komunikatif, dan sesuai untuk pembelajaran mandiri.

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Produk

| No | Aspek yang Dinilai | Persentase | Predikat |
|-----------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 | Kelayakan Materi | 91% | Sangat Layak |
| 2 | Kelayakan Kurikulum | 89% | Sangat Layak |
| 3 | Kelayakan Media Website | 93% | Sangat Layak |
| Rata-rata | | 91% | Sangat Layak |

Data tersebut menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memperoleh rata-rata kelayakan sebesar 91% dengan predikat sangat layak. Hasil ini menegaskan bahwa pengembangan kurikulum, silabus, dan website anti korupsi berbasis digital dapat digunakan

sebagai model pelatihan ASN di Kalimantan Tengah. Hasil implementasi terbatas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ASN setelah menggunakan produk pelatihan. ASN menyatakan bahwa model digital memudahkan akses materi, meningkatkan fleksibilitas belajar, serta membantu memahami anti korupsi secara lebih konkret melalui studi kasus dan evaluasi mandiri.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama ASN Kalimantan Tengah bukan sekadar pemahaman konseptual tentang korupsi, tetapi kebutuhan terhadap sistem pelatihan yang terstruktur, kontekstual, dan berkelanjutan. Kondisi awal yang berada pada kategori cukup menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi umum belum cukup efektif dalam membangun kompetensi anti korupsi yang mendalam. Temuan ini sejalan dengan pandangan Maheka (2023) bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pengetahuan normatif, tetapi membutuhkan pembentukan budaya integritas melalui pendidikan sistematis. Pengembangan kurikulum dan silabus berbasis ADDIE terbukti memberikan struktur yang lebih komprehensif karena dimulai dari analisis kebutuhan nyata ASN daerah. Hal ini sesuai dengan teori instructional design Reigeluth (2009) yang menekankan bahwa pembelajaran efektif harus dirancang berdasarkan kebutuhan peserta dan tujuan spesifik organisasi. Dalam konteks penelitian ini, ASN Kalimantan Tengah memerlukan desain pelatihan yang tidak hanya menjelaskan definisi korupsi, tetapi juga menekankan pencegahan administratif, konflik kepentingan, serta budaya pelayanan publik bersih. Website pelatihan yang dikembangkan menjadi kebaruan utama penelitian ini. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pendidikan anti korupsi di sekolah atau pelatihan tatap muka umum, maka penelitian ini menghasilkan integrasi antara kurikulum, silabus, dan platform digital dalam satu model. Temuan ini memperkuat gagasan Baseng (2016) bahwa inovasi sistem diklat modern harus mengarah pada transformasi digital agar lebih efektif, fleksibel, dan terukur.

Dari sudut praktis, website pelatihan memungkinkan ASN belajar secara mandiri, berulang, dan terstandarisasi. Hal ini penting karena luas wilayah Kalimantan Tengah dan variasi akses pelatihan konvensional dapat menjadi hambatan pemerataan kompetensi. Dengan demikian, digitalisasi pelatihan bukan hanya inovasi teknis, tetapi strategi pemerataan pendidikan anti korupsi. Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Wahyudi (2025) yang menekankan pentingnya pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan integritas berbasis lokalitas. Dalam konteks ASN, nilai anti korupsi harus diinternalisasi melalui pendekatan yang dekat dengan realitas birokrasi daerah, bukan sekadar mengadopsi model nasional secara umum. Oleh karena itu, produk yang dikembangkan memiliki kebaruan berupa local-based anti corruption training model. Dibandingkan penelitian lain yang umumnya hanya menghasilkan modul atau pelatihan konseptual, penelitian ini menghasilkan tiga produk sekaligus, yaitu kurikulum, silabus, dan website. Hal ini menunjukkan kebaruan teoritis pada integrasi desain pembelajaran dan kebaruan praktis pada implementasi sistem digital ASN daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan anti korupsi ASN membutuhkan pendekatan multidimensional: penguatan kurikulum, sistem pembelajaran, dan digitalisasi. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya relevan untuk Kalimantan Tengah, tetapi juga berpotensi direplikasi di provinsi lain sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional berbasis integritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan model komprehensif pengembangan pelatihan anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalimantan Tengah melalui pendekatan Research

and Development (R&D) dengan model ADDIE. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi awal pemahaman ASN terhadap pendidikan anti korupsi berada pada kategori cukup, yang menunjukkan bahwa pemahaman dasar telah ada, tetapi belum didukung oleh sistem pelatihan yang terstruktur, kontekstual, dan terintegrasi secara digital. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pelatihan konvensional yang selama ini bersifat parsial belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penguatan integritas ASN daerah. Hasil pengembangan penelitian ini berhasil menghasilkan tiga produk utama, yaitu kurikulum pelatihan anti korupsi ASN Provinsi Kalimantan Tengah, silabus pelatihan anti korupsi berbasis kompetensi, dan website pelatihan anti korupsi berbasis online. Kurikulum yang dikembangkan disusun berdasarkan analisis kebutuhan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip pendidikan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Administrasi Negara. Silabus yang dihasilkan mampu menerjemahkan struktur kurikulum ke dalam proses pembelajaran sistematis, terukur, dan aplikatif. Website pelatihan menjadi inovasi utama penelitian karena menyediakan akses pembelajaran fleksibel, mandiri, dan berkelanjutan bagi ASN.

Hasil uji ahli menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memiliki tingkat kelayakan sangat tinggi pada aspek materi, kurikulum, dan media digital. Hal ini menunjukkan bahwa model pelatihan yang dirancang telah memenuhi standar akademik, kebutuhan praktis ASN, serta tuntutan transformasi digital birokrasi modern. Integrasi antara kurikulum, silabus, dan website menjadi kebaruan utama penelitian ini karena penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada pendidikan anti korupsi secara umum tanpa mengembangkan sistem pelatihan daerah berbasis digital yang utuh. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan teori instructional design dan pengembangan diklat berbasis kompetensi dalam konteks pendidikan anti korupsi ASN daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata berupa model pelatihan yang dapat digunakan sebagai instrumen strategis reformasi birokrasi dan penguatan budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Model ini juga berpotensi direplikasi pada wilayah lain dengan penyesuaian kebutuhan lokal masing-masing. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan anti korupsi ASN tidak cukup hanya melalui sosialisasi atau pelatihan umum, tetapi membutuhkan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan daerah yang terstruktur, terukur, dan terdigitalisasi. Pengembangan model pelatihan anti korupsi berbasis digital ini menjadi langkah strategis dalam membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abnur, A. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementerian PANRB.
- Baseng. (2016). Inovasi sistem diklat: Modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Chaerudin, M. H. (2008). Tindak pidana korupsi. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Entang, H. M. (2009). Analisis kebutuhan diklat. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Fadly, W. (2022). Model-model pembelajaran untuk implementasi Kurikulum Merdeka. Bantul, Indonesia: Bening Pustaka.
- Hartanti, E. (2005). Tindak pidana korupsi. Semarang, Indonesia: Sinar Grafika.
- Jalis, A. (2021). Modul kompeten pelatihan dasar CPNS. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.

- Kridasakti, S. W., & Purwastuti. (2005). Dasar-dasar penelitian ilmiah: Modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat pertama. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- LAN. (2014). Modul anti korupsi. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Maheka, A. (2023). Mengenali dan memberantas korupsi. Jakarta, Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marpaung, P. M., & Mataram, A. A. A. (2006). Dasar-dasar analisis kebutuhan diklat. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Pribadi, B. A. (2024). Desain dan pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Purwastuti. (2016). Teknik perkonsultansian pelatihan: Modul pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Ratna, S. (2016). Perancangan sistem diklat: Modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Reigeluth, C. M. (1983). Instructional-design theories and models: An overview of their current status (Vol. I). London, England: Lawrence Erlbaum Associates.
- Reigeluth, C. M. (1999). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. II). London, England: Lawrence Erlbaum Associates.
- Reigeluth, C. M., & Carr-Chellman, A. A. (2009). Instructional-design theories and models: Building a common knowledge base (Vol. III). London, England: Routledge.
- Rohim. (2008). Modus operandi tindak pidana korupsi. Jakarta, Indonesia: Pena Mulia Media.
- Rukmana, N. (2016a). Filsafat diklat: Modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Rukmana, N. (2016b). Penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Sampeliling, T. C. (2021). Pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS Kota Makassar (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
- Santosa, S. (2023). Panduan lengkap SPSS versi 27. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Sudirta, I. G. (2019). Rancangan pemetaan kompetensi dosen Fakultas Teknik dan Kejuruan. Bali, Indonesia: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyanto, Purwanto, B., & LAN. (2006a). Metode penelitian ilmiah kediklatan. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Sugiyanto, Purwanto, B., & LAN. (2006b). Metode penelitian kualitatif: Modul diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat utama. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Suprapti, W. (2019). Modul kepemimpinan transformasional. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Tim Nuansa Aulia. (2008). Tindak pidana korupsi dan suap. Bandung, Indonesia: Nuansa Aulia.
- Tim Penyusun Modul KPK. (2015). Modul anti korupsi pendidikan dan pelatihan prajabatan. Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara.
- Trianto. (2010). Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif. Jakarta, Indonesia: Kencana.

- Wahyudi (2023). Characteristics of Citizenship: Digital Access and Digital Literacy Civic Education Teacher in Surabaya City. Conference International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023) Pages 1009-1015
- Wahyudi. (2024). Strengthening Civic Competences and State Defense of Children of Indonesia Migrant Workers in Sebatik, Indonesia-Malaysia Border. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Volume 3, Issue 2 Pages 1924-1929
- Wahyudi. (2025). Civic Education and Bullying: Strengthening the Civic Disposition in Preventing Bullying in Junior High Schools. Journal Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal), Volume 1
- Wardiana, W. (2020). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta, Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi.